



Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulau Morotai Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa

Idhan Dominggus¹, Fandi Hi. Latief²

^{1,2}Dosen Universitas Pasifik Morotai

Abstract

Received: 20 Juni 2025

Revised: 27 Juni 2025

Accepted: 01 Juli 2025

The study aims to determine the extent to which the Role of the Community and Village Empowerment Service of Morotai Island Regency in Improving the Performance of Village Government Apparatus. The research technique is a qualitative method, in this study the data collection process includes observation, interviews, documentation. The results of the study found that the Community and Village Empowerment Service of Morotai Island Regency has carried out performance in accordance with the provisions of performance measurement indicators in improving the performance of village government apparatus. There are various development programs implemented to encourage the performance of village government apparatus. The conclusion of this study is that the Role of the Community and Village Empowerment Service of Morotai Island Regency in Improving the Performance of Village Government Apparatus has not run optimally because there are inhibiting factors in improving the performance of village government apparatus, where most of the human resources of village government apparatus are still high school educated, so what is done by the Community and Village Empowerment Service in improving the performance of village government apparatus has not been well understood.

Keywords: *Improvement, Performance of Village, Government Apparatus*

(*) Corresponding Author: idhandominggus@gmail.com

HowtoCite: Dominggus, I., & Latief, F. (2025). Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulau Morotai Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(7.D), 550-555. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12830>.

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah memiliki peran yang cukup penting dalam membantu peningkatan pengembangan nasional dalam jangkauan wilayah nasional administratifnya. Hal tersebut dikarenakan oleh pemerintah daerah memiliki hal otonom untuk mengelola dan mengembangkan potensi yang ada di daerahnya baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.

Peran Pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga merupakan salah satu instansi pemerintah yang berfungsi sebagai pelayanan public yang bekerja dalam tatanan kemasyarakatan salah satunya dimasyarakat desa. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa sangat dituntut berperan aktif untuk membuat program kerja dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga merupakan fasilitator dalam usaha pengembangan masyarakat desa yang dapat membantu permasalahan di desa. (Yulianti Yayuk, 2002).

Demi terwujudnya pembanguanan desa yang efektif dan efisien, tentunya dibutuhkan perencanaan yang matang. Dengan memperhitungkan segenap potensi

yang dimiliki, tim kerja yang profesional dan pola pelaksanaan pembangunan yang tepat. Dengan demikian ditubuhkan sumber daya manusia terutama perangkat desa yang profesional. Dari segi pendidikan, pengetahuan dan keterampilan sesuai tugas yang diemban. Pemerintah desa merupakan ujung tombak penerapan dalam terciptanya pelayanan prima untuk masyarakat. Untuk itu penting adanya upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa untuk menjadikan desa lebih profesional, transparan dan akuntabel dalam mewujudkan pembangunan desanya. Pemerintah desa diharapkan memiliki kemampuan yang optimal dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulau Morotai melakukan perencanaan terkait dengan peningkatan aparatur pemerintah desa, dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulau Morotai melakukan pembinaan dan pengawasan kepada aparatur desa sesuai dengan regulasi, baik kepala desa, perangkat desa dan kelembagaan-kelembagaan yang ada di desa. Agar pelaksanaan perencanaan dapat berjalan dengan baik, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulau Morotai melakukan pembinaan dalam peningkatan aparatur pemerintah desa yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2023-2026 dimana program dan kegiatan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pulau Morotai tahun 2023-2026.

Namun, terdapat faktor yang menjadi hambatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa, hambatan-hambatan tersebut adalah sumber daya manusia yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maupun pada Pemerintah Desa itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa di Kabupaten Pulau Morotai.

METODE

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, menggunakan jenis penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai objek, subjek dan tempus penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulau Morotai. Untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara terhadap informan serta dokumentasi hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian tersebut.

Penggunaan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah menghasilkan sejumlah besar informasi rinci mengenai sejumlah kecil orang dan kasus. Hal ini memungkinkan pemahaman terhadap kasus-kasus dan situasi itu, namun juga mengurangi kemungkinan generalisasi. (Sugiyono, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulau Morotai Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa

Dalam pelaksanaan Pemerintah Desa dituntut adanya suatu aspek tata pemerintah yang, dimana salah satu karakteristik atau unsure utama dari pemerintah yang baik yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodic. Jadi, akuntabilitas sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik. (Aprisiami, 2012).

1. Peningkatan Kapasiats Aparatur Pemerintah Desa

Kapasitas terdiri dari sejumlah kemampuan, ketampilan, pemahaman, sikap, nilai, hubungan, tingkahlaku, motivasi, sumber dan kondisi yang memungkinkan individu, organisasi, jaringan/sector dan sistem social yang luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi dan mencapai tujuan-tujuan mereka sepanjang waktu. Balge, 2012: 2). Hal ini menjadi pengembangan yang diharapkan dari dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dapat meningkatkan kemampuan, keterampilan, pemahaman dalam meningkatkan kapabilitas dalam proses pemerintah di desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa merupakan instansi pemerintah yang membuat kebijakan dalam peningkatan aparatur pemerintah desa. Yang dimaksud diatas dan juga dapat dijelaskan bahwa kebijakan yang dimaksud pula disini adalah kebijakan public atau kebijakan umum. Kebijakan public adalah kebijakan yang menyangkut masyarakat umum. Kebijakan public ini adalah bagian dari keputusan politik. Keputusan politik itu sendiri adalah keputusan yang mengikat pilihan terbaik dari berbagai bentuk alternative mengenai urusan-urusan yang menjaddi kewenangan pemerintah. (Roro Mas, 2005).

Peningkatan kapasitas aparatur desa kini menjadi hal yang sangat penting demi memberikan kontribusi signifikan bagi efektifitas pelaksanaan Undang-Undang Desa, untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri dan sejaterah. Termasuk kemampuan dalam pelaksanaan tugas poko dan fungsi aparatur pemerintah desa. Seperti bidang manajemen pemerintah desa, penyusunan perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa.

Demi meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan uapaya agar dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa tersebut. Dimana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Pulau Morotai melakukan pelatihan dan studi banding kepada seluruh aparatur pemerintah desa se-Kabupaten Pulau Morotai, hal tersebut dilakukan demi tujuan untuk dapat meningkatkan kinerja maupun pemahaman terkait dengan menjalankan kerja-kerja sebagai aparatur pemerintah desa.

2. Peningkatan Intergritas Aparatur Pemerintah Desa

Instegritas adalah integrasi antara etika dan moralitas, semakin keduanya terintegritas semakin tinggi level integritas yang ada sehingga integritas dapat menghasilkan sifat keteladanan seperti kejujuran, tanggung jawab, dan loyalitas yangmelibatkan keyakinan dasar terhadap kebenaran sesuatu yang melekat dengan kuat dalam diri seseorang. (Yaumi, 2016; 66).

Peningkatan integritas aparatur pemerintah desa adalah upaya untuk memastikan bahwa perangkat desa memiliki moralitas dan etika yang tinggi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Hal ini melibatkan pembentukan

karakter yang kuat, penegakan kode etik, serta peningkatan kapasitas dan profesionalisme. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pemerintah desa yang peningkatan integritas, diharapkan aparatur pemerintah desa tersebut dapat menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik, serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat desanya.

Demi meningkatkan integritas kinerja aparatur pemerintah desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulau Morotai melakukan pelatihan dan pembinaan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa juga berupaya dalam meningkatkan integritas aparatur pemerintah desa dalam menjalankan tugas mereka. Hal tersebut termaksud pemahaman tentang etika birokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa.

3. Fasilitasi dan Pembimbingan Aparatur Pemerintah Desa

Untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya, maka usaha pembinaan harus dilaksanakan dengan menyusun strategi dan perencanaan yang nasional sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas serta mempunyai program yang jelas. (A. Mangunharjana, 1989: 12). Hal ini penting agar program pembinaan dapat mencapai sasaran yang tepat yaitu prestasi yang tinggi, seperti apa yang diinginkan. Program pembinaan adalah prosedur yang dijadikan landasan. Program pembinaan menyankut: sasaran, isi, pendekatan, metode pembinaan.

Pembinaan adalah usaha-usaha yang meliputi pemeliharaan, penyelamatan, pengolahan dimana termaksud juga sebagai usaha pemberian bimbingan, pengarahan, penelitian, pengendalian, pencatatan dan peningkatan mutu. Dimana semua usaha tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, juga dapat merupakan serangkaian usaha yang dilakukan secara continue.

Demi terwujudnya peningkatan pemerintah desa, melalui Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulau Morotai telah mengakomodir perangkat-perangkat desa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya dapat meningkatkan dan mengembangkan kapasitas serta kapabilitas dari Pemerintah Desa yang ada di Kabupaten Pulau Morotai itu sendiri.

Tujuan dari pembinaan aparatur pemerintah desa yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulau Morotai ini adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasiats dan kerja aparatur pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintah desa. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pelayanan public yang dilakukan oleh pemerintah desa yang ada di Kabupaten Pulau Morotai dapat berjalan secara efektif, pembangunan desa yang berkelanjutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada didesa itu sendiri. Dalam melakukan fasilitasi dan pembinaan terhadap kinerja aparatur pemerintah desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulau Morotai melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur pemerintah desa yang ada di Kabupaten Pulau Morotai dalam rangkat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Tujuan pemberian bimbingan dan arahan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulau Morotai agar pemerintah desa lebih kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsi selaku pemerintah desa.

4. Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintah Desa

Dalam upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa ini perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi dalam hal ini pengawasan yang dimaksud

melihat dalam upaya pengendalian agar dapat mengatur kegiatan, agar kegiatan-kegiatan organisasi itu dapat berjalan sesuai dengan rencana. Disamping itu, pengawasan juga dimaksud untuk mencari jalan keluar atau pemecahan apabila terjadi hambatan pelaksanaan kegiatan. (Notoatmojo Soekidjo, 1998).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mana kedudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemerintah Desa adalah unsure pelaksanaan pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa yang menjadi urusan rumah tangga daerah, dalam penyelenggaraan tugasnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemerintah Desa mempunyai fungsi: Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, pembinaan terhadap cabang dinas dalam lingkup tugasnya. Kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan dibidang pembimbingan desa.

Pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulau Morotai terhadap kinerja Aparatur Pemerintah Desa adalah untuk melihat kembali hasil dari setiap lembaran hasil dari kegiatan yang telah dilakukan oleh aparatur pemerintah desa. Tujuannya yaitu untuk memberikan penilaian sejauh mana pencapaian hasil kerja berdasarkan rencaran dan tugas yang telah ditetapkan sebelumnya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulau Morotai selalu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan oleh aparatur pemerintah desa dengan tujuan sejauh mana peningkatan yang telah dilakukan oleh aparatur pemerintah desa yang ada di Kabupaten Pulau Morotai.

Faktor Penghambat Penikatan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa

Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Desa dilihat dari sisi perbaikan kualitas pemerintah yang harus dimulai sejak rekrutmen dengan benar-benar menjamin penggunaan sumber daya yang memang memiliki kualitas dasar yang baik, pembinaan melalui penugasan pelatihan yang mendukung tersedianya tenaga-tenaga siap pakai, peningkatan kesejahteraan yang memadai dan mempersembahkan jaminan hari secara nyata.

Mengingat besarnya tugas pemerintah Desa maka kualitas Sumber Daya Manusia pada Pemerintah Desa harus ditingkatkan, pemerintah Desa harusnya membutuhkan sumber daya manusia yang dapat diandalkan sebagai organisasi pemerintahan sekaligus instrumen pemerintah desa sebagai lembaga pelayanan masyarakat.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulau Morotai dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa tentunya banyak mengalami hambatan-hambatan, baik itu dari segi sumber daya manusia yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maupun pada Pemerintah Desa itu sendiri, dimana sebagian besar para pemerintah desa yang ada di Kabupaten Pulau Morotai masi kebanyakan berpendidikan SMA, sehingga apa yang dilakukan oleh DPMD dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa belum memahami secara baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulau Morotai dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa telah melakukan upaya agar dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa di semua desa se-Kabupaten Pulau Morotai, dimana dilakukan melalui pelatihan dan studi banding diluar daerah. Hal tersebut agar dapat meningkatkan pemahaman bagi aparatur pemerintah desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulau Morotai juga melakukan pelatihan dan pembinaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga berupaya meningkatkan integritas aparatur desa dalam menjalankan tugas mereka. Hal ini termasuk pemahaman tentang etika birokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulau Morotai melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur desa di Kabupaten Pulau Morotai dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulau Morotai juga telah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap aparatur pemerintah desa. Terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan kinerja aparatur pemerintah desa adalah sumber daya manusia, baik pada Pemerintah Desa maupun pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Yulianti, Yayuk. 2002. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama
- Sugiyono. (2016:225). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Aprisiami, P. (2012). *Penerapan Otonomi Desa Dalam Menguatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aglik Kecamatan Grabak Kabupaten Purworejo*. Yogyakarta : Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Berger, Arthur Asa. 2000. *Media Analysis Techniques*. Alih Bahasa Setio Budi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ekowati, Mas Roro Lilik, 2005. *Perencanaan Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program (Suatu Kebijakan Teoritis dan Praktis)*. Surakarta : Pustaka Cakra.
- Yaumi, Muhammad. 2016. *Pendidikan Karakter: Landasan, Pilar & Implementasi*. Jakarta: Prenamedia Group.
- A.Mangunhardjana (1989). *Pembinaan Arti Metodenya*, Jakarta: Penerbit Kanisius.
- Notoatmodjo, Soekidjo, 1998, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, cetakan ke-2, Jakarta: Rineka Cipta.